

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)

Chairul Sugara *

Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D **

Dr. Danialsyah, S.H., M.H ***

Tidak semua putusan yang diperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat di eksekusi sebab bila pihak yang merasa kalah secara sukarela telah menyerahkan apa yang menjadi obyek sengketa kepada pihak pemohon eksekusi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah apabila ketika putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang atau putusan kasasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah adanya kerjasama dengan pihak antara pihak keamanan, pihak pemerintahan dengan tokoh masyarakat setempat serta guna mencegah objek sengketa dipindah tangan kepada pihak lain, maka dapat dilakukan upaya permohonan sita jaminan terhadap objek perkara yang diajukan oleh penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. .

Kata Kunci: Putusan, Pengadilan, Berkekuatan Hukum Tetap

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE UNENFORCEABILITY OF COURT DECISIONS IN CIVIL CASES WHICH ALREADY HAVE PERMANENT LEGAL FORCE (INKRACHT)

Chairul Sugara *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D **
Dr. Danialsyah, S.H., M.H ***

Not all decisions that have definite legal force can be executed because if the party who feels defeated has voluntarily handed over the object of the dispute to the party requesting the execution. The problem in this thesis is how the court decision is said to have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde), how the obstacles in the implementation of the execution of the court decision are said to have obtained permanent legal force, what efforts are taken to overcome these obstacles.

The research carried out is normative research, namely analyzing statutory regulations related to the problems in this thesis and the data analysis used is qualitative data.

A court decision is said to have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) according to the Elucidation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 5 of 2020 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency, if the first instance court decision is not appealed. or cassation within the time specified by the Law, an appellate court decision that is not appealed to within the time specified by the Law or a cassation decision. Obstacles in the execution of court decisions are said to have gained legal force due to resistance by the executed party.

Based on the results of the research, it is understood that efforts taken to overcome these obstacles include cooperation between security forces, government and local community leaders and to prevent the object of the dispute from being transferred to another party, efforts can be made to request confiscation of collateral for the object of the case. submitted by the plaintiff during the case examination process. .

Keywords: Decision, Court, Permanent Legal Force.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*